

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses perubahan sistem yang direncanakan ke arah perbaikan yang orientasinya pada pembangunan bangsa dan sosial ekonomi, sehingga untuk mewujudkan pembangunan bangsa diperlukan pilar yang kuat dari segi pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi menurut Kuznet didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan kapasitas produksi dalam jangka panjang oleh suatu negara untuk menyediakan barang dan jasa kepada penduduknya. Sedangkan menurut Todaro pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan yang semakin besar.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi tolok ukur pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut Boediono (1999), salah satu indikator yang paling penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara atau daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh pencapaian tingkat Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu negara pada suatu periode tertentu. Menurut Todaro (2002), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai total atas segenap *output* akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah (baik itu yang dilakukan oleh penduduk

daerah maupun penduduk dari daerah lain yang bermukim di daerah tersebut. Nilai PDRB ini akan menjelaskan sejauh mana kemampuan daerah dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang ada.

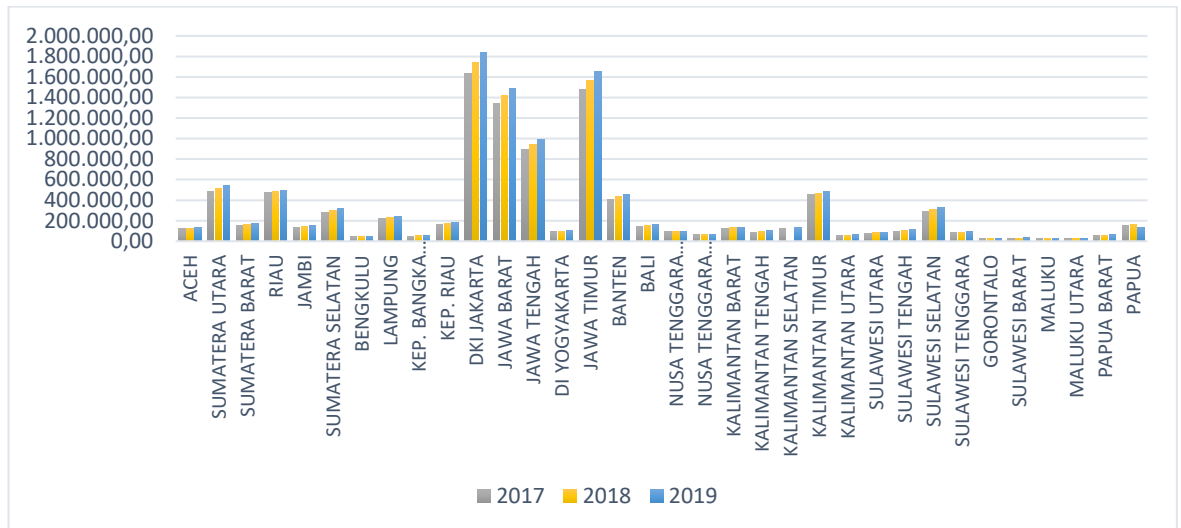
Pembangunan nasional di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pembangunan daerah, karena wilayah Indonesia terdiri atas provinsi-provinsi, kabupaten/kota serta daerah-daerah yang lebih kecil. Masing-masing provinsi di Indonesia memiliki kemampuan ekonomi yang beragam, namun nampaknya provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar daripada provinsi-provinsi yang berada di luar Pulau Jawa. Hal tersebut terjadi karena hampir setengah penduduk Indonesia bertempat tinggal dan memutar perekonomiannya di Pulau Jawa. Selain itu, Pulau Jawa juga menjadi tempat teraglomerasinya kegiatan ekonomi di Indonesia. Di Pulau Jawa terdapat 6 provinsi, yaitu provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten.

Berdasarkan garfik 1.1 memperlihatkan bahwa kemampuan ekonomi yang dimiliki provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa melebihi kemampuan ekonomi provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa.

Grafik 1.1 PDRB Seluruh Provinsi di Indonesia

Menurut Harga Konstan Tahun 2010

Periode Tahun 2017-2019 (Dalam Milyar Rupiah)



Sumber : *Badan Pusat Statistika*

Berdasarkan grafik 1.1 di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2017-2019, kemampuan ekonomi (yang digambarkan oleh besarnya PDRB) seluruh provinsi yang berada di Pulau Jawa memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang berada di luar Pulau Jawa. Selain itu, secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi pada 6 (enam) provinsi di Pulau Jawa tahun 2017-2019 memiliki trend yang meningkat, dimana nilai PDRB yang dihasilkan dari 6 provinsi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga secara umum, perekonomian Indonesia hampir dikuasai oleh Pulau Jawa.

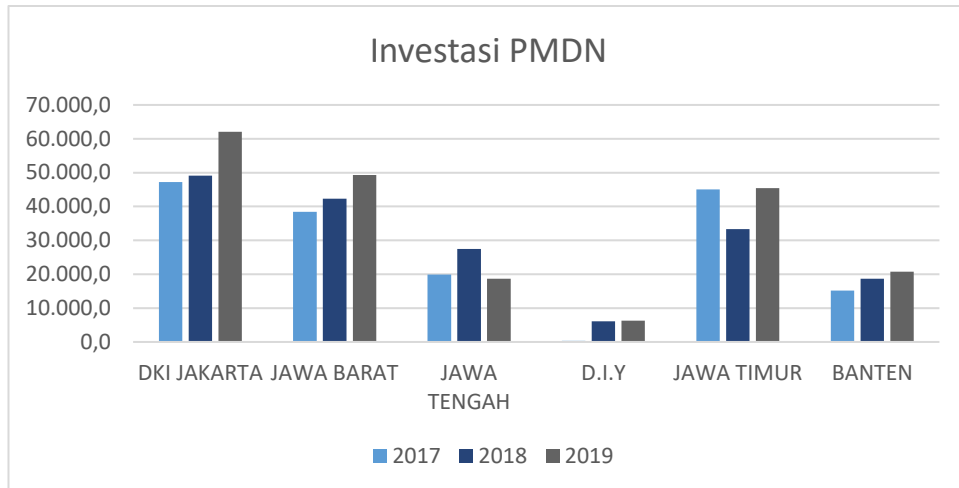
Harrod-Domar di dalam teorinya mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang tangguh atau *steady growth* dalam jangka panjang yaitu perlunya investasi. Investasi

merupakan mobilisasi sumber daya untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi/pendapatan di masa yang akan datang. Investasi dapat meningkatkan kapasitas produksi yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sumber-sumber ekonomi yang diperlukan untuk menghasilkan output dan nilai tambah yang lebih besar, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan output.

Peningkatan kapasitas produksi dalam kegiatan investasi diperoleh melalui kegiatan investasi, baik yang merupakan investasi swasta (*Private Investment*) yang bisa disebut dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun investasi luar negeri yang disebut dengan Penanaman Modal Asing (PMA). Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang produksi, untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian yang berasal dari investasi dalam negeri. Di sisi lain, Penanaman Modal Asing (PMA) sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan nilai *output* suatu daerah, mempercepat pembangunan ekonomi, dan membantu industrialisasi dalam membangun modal *overhead* ekonomi serta dalam menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas.

Grafik dibawah ini menggambarkan bagaimana perkembangan realisasi investasi PMDN dan PMA seluruh provinsi di Pulau Jawa selama kurun waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2015-2019.

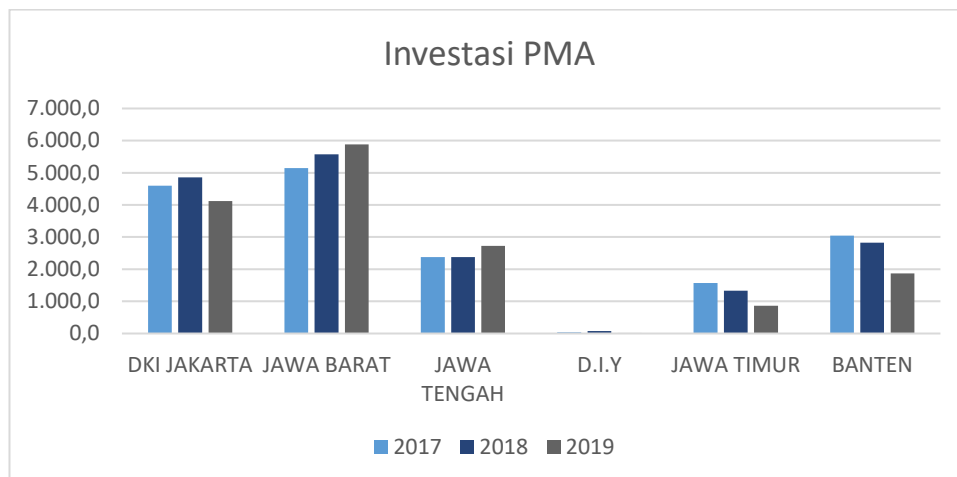
**Grafik 1.2 Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Seluruh Provinsi di Pulau Jawa
Periode Tahun 2017-2019 (Milyar Rupiah)**



Sumber : *Badan Pusat Statistika*

Berdasarkan grafik 1.2 diatas, realisasi investasi PMDN seluruh provinsi di Pulau Jawa selama kurun waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2017-2019 beberapa ada yang fluktuatif, seperti pada provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, sementara untuk provinsi lainnya mengalami kenaikan seperti pada provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Banten, dimana masing-masing provinsi memiliki nilai realisasi investasi PMDN tertinggi pada tahun 2019, kecuali provinsi Jawa Tengah yang mana pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2018.

**Grafik 1.3 Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri/Asing (PMA)
Menurut Seluruh Provinsi di Pulau Jawa
Periode Tahun 2017-2019 (Juta US\$)**



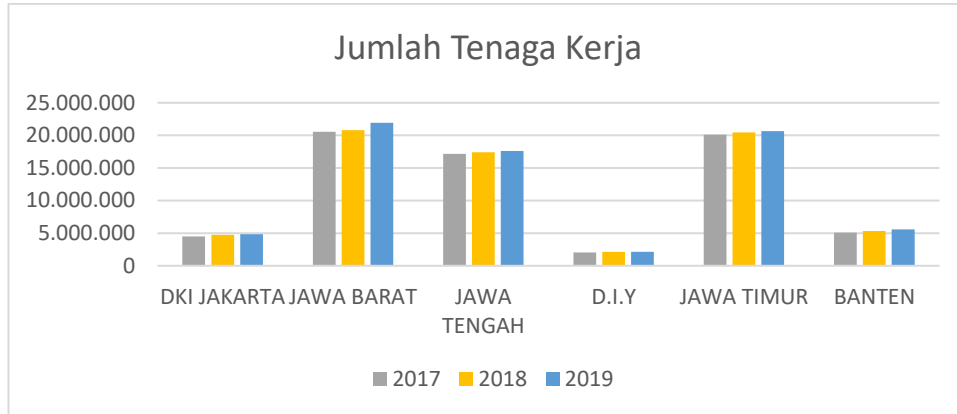
Sumber : *Badan Pusat Statistika*

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat realisasi investasi Penanaman Modal Luar Negeri/Asing menurut seluruh provinsi di Pulau Jawa dari tahun 2017-2019. Berdasarkan data tersebut realisasi investasi PMA seluruh provinsi di Pulau Jawa setiap tahunnya mengalami perubahan atau bersifat fluktuatif. Berdasarkan keenam provinsi di pulau Jawa dari tahun 2015-2019 provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan realisasi investasi PMA tertinggi diantara provinsi lainnya di pulau Jawa, sedangkan provinsi DI Yogyakarta memiliki realisasi investasi PMA terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi DI Yogyakarta belum optimal dalam usaha menarik investor yang dapat memberdayakan potensi ekonomi di wilayahnya.

Realisasi investasi baik PMDN maupun PMA di Pulau Jawa terbilang memiliki nilai paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lain yang berada di luar Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa lebih merata dan memadai dibandingkan luar Pulau Jawa, sehingga banyak investor yang lebih tertarik berinvestasi di Pulau Jawa.

Menurut Todaro (2004), modal pembangunan yang penting selain investasi adalah sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang cukup besar dan diikuti dengan tingkat pendidikan yang tinggi serta memiliki *skill* yang bagus akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi, karena dari jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi di suatu daerah. Robert Solow dan Trevor Swan mendefinisikan proses pertumbuhan *output* bergantung pada penambahan penyediaan faktor produksi, yang salah satunya adalah jumlah penduduk sebagai penyedia tenaga kerja (disamping akumulasi kapital serta tingkat kemajuan teknologi). Oleh karena itu, sampai mana perekonomian akan berkembang tergantung pada pertumbuhan penduduk, jumlah tenaga kerja, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi yang akan mempengaruhi perubahan pada tingkat *output* yang dihasilkan (PDB pada tingkat nasional dan PDRB) pada tingkat daerah (Arsyad, 2016).

**Grafik 1.4 Jumlah Tenaga Kerja Seluruh Provinsi di Pulau Jawa
Periode Tahun 2017-2019 (Jiwa/Orang)**



Sumber : *Badan Pusat Statistika*

Grafik 1.4 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja seluruh provinsi di Pulau Jawa selama kurun waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2015-2019 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berdasarkan grafik diatas, provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah memiliki nilai jumlah tenaga kerja yang tinggi, sedangkan provinsi DKI Jakarta, D I Y dan Banten memiliki nilai jumlah tenaga kerja yang rendah atau sedikit. Permasalahan penyediaan kesempatan kerja di Pulau Jawa menjadi penting dengan kondisi penduduk yang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pertambahan penduduk membuat jumlah angkatan kerja di Pulau Jawa meningkat. Kondisi ini akan menyebabkan permasalahan pada tidak seimbangnya permintaan dan penawaran terhadap tenaga kerja.

Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah produksi. Selain itu, sebagai akibat dari pendidikan, latihan, dan pengealaman kerja, keterampilan penduduk akan selalu bertambah tinggi. Hal ini akan meyebabkan produktivitas bertambah, dan selanjutnya akan menimbulkan pertambahan produksi yang lebih

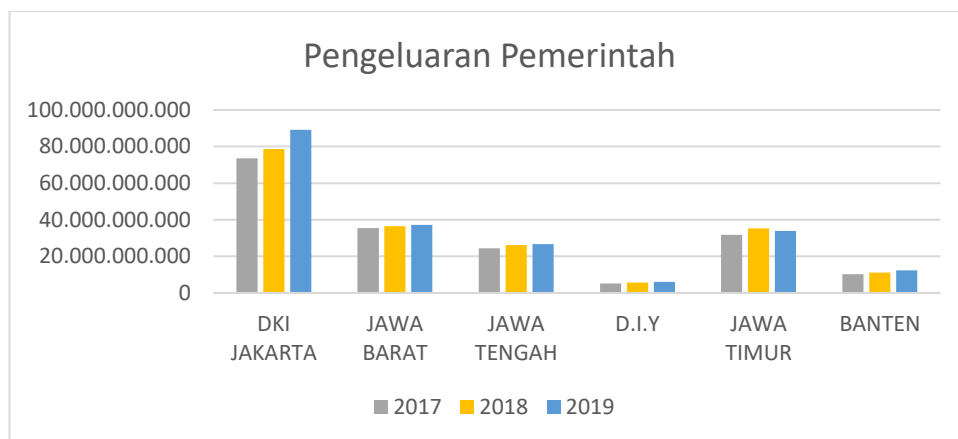
cepat daripada pertambahan tenaga kerja (Sukirno, 2006). Produktivitas tenaga kerja menunjukkan kemampuan seorang tenaga kerja untuk menghasilkan sejumlah output dalam kurun waktu tertentu. Produktivitas tenaga kerja dapat menjadi ukuran efisiensi pemanfaatan tenaga kerja. Namun kenyatannya, seorang pekerja tidak selalu memaksimalkan potensinya dalam melakukan pekerjaannya (Saepudin, 2011).

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat PDRB suatu daerah yakni pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah sendiri merupakan bentuk rangsangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perekonomian daerah untuk meningkatkan *output*. Semakin besar nilai pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk pembangunan, maka akan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Ini berarti kondisi ekonomi di daerah tersebut juga akan meningkat. Pengeluaran Pemerintah mempunyai hubungan yang erat dengan PDRB atau pertumbuhan ekonomi karena belanja pembangunan ditujukan untuk membiayai fungsi *agent of development* sehingga dari pengeluaran ini akan menghasilkan kembali produk-produk yang sangat diperlukan guna meningkatkan kemajuan tingkat perekonomian.

Adolf Wagner dalam teorinya menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka

secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

Grafik 1.5 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Seluruh Provinsi di Pulau Jawa Periode Tahun 2017-2019 (Ribu Rupiah)



Sumber : *Badan Pusat Statistika*

Grafik diatas menunjukkan realisasi pengeluaran pemerintah seluruh provinsi yang ada di Pulau Jawa pada tahun 2015-2019. Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan realisasi pengeluaran pemerintah tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya yang berada di Pulau Jawa selama kurun waktu 3 tahun, yaitu sebesar 89.088.351.843 (Ribu Rupiah) pada tahun 2019 yang mana menjadi nilai realisasi pengeluaran pemerintah tertinggi. Sedangkan, provinsi DI Yogyakarta memiliki realisasi pengeluaran pemerintah terendah diantara provinsi lainnya di Pulau Jawa.

Pengeluaran pemerintah merupakan perwujudan dari kebijakan pemerintah dalam rangka pelayanan publik, diantaranya meliputi pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pembangunan sektor ekonomi.

Pengeluaran pemerintah berperan penting dalam kegiatan ekonomi yang akan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi (Saepudin, 2013).

Berdasarkan fenomena tersebut menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Seluruh Provinsi di Pulau Jawa”**.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memeperjelas permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi PMDN dan PMA, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah seluruh provinsi di Pulau Jawa?
2. Bagaimana pengaruh investasi PMDN dan PMA, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) seluruh provinsi di Pulau Jawa?
3. Variabel independen manakah yang paling besar pengaruhnya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) seluruh provinsi di Pulau Jawa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui karakteristik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi PMDN dan PMA, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah seluruh provinsi di Pulau Jawa.
2. Untuk mengetahui pengaruh investasi PMDN dan PMA, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) seluruh provinsi di Pulau Jawa.
3. Untuk mengetahui variabel independen manakah yang paling besar pengaruhnya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) seluruh provinsi di Pulau Jawa.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis

Adapun manfaat akademik dari penelitian ini yaitu, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan teoritis/akademis berupa sumber informasi khususnya pada kajian ilmu ekonomi yang berkaitan dengan Pertumbuhan tingkat *output* Pulau Jawa, serta dapat memberikan sumbangan pengetahuan terkait analisis Pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) seluruh provinsi di Pulau Jawa.

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan praktis/empiris berupa :

1. Guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
2. Sebagai acuan penelitian pada penelitian sejenis dimasa yang akan datang.
3. Bagi pembaca, hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan juga referensi pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi secara singkat diartikan sebagai proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Tekanannya dititikberatkan pada tiga aspek, yaitu proses, peningkatan *output* per kapita dan dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat (*one shoot*). Di sini dapat dilihat adanya aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat perekonomian sebagai sesuatu yang berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri (Boediono, 1992).

Menurut Boediono (1999), pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dari kenaikan output perkapita dalam jangka waktu yang panjang, itu menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Pertumbuhan ekonomi disini meliputi tiga aspek :

1. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses (aspek) ekonomis, suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.
2. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita, dalam hal ini ada dua aspek penting, yaitu output total dan jumlah penduduk.

3. Pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan prespektif waktu, suatu perekonomian dikatakan tumbuh bila dalam jangka waktu yang cukup lama (lima tahun) mengalami kenaikan output perkapita.

$$\text{Rumus Pertumbuhan ekonomi} = \frac{(\text{PDBt}-\text{PDBt-1})}{\text{PDBt}} \times 100\%$$

Laju pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh laju kenaikan barang dan jasa pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kinerja atau aktivitas berbagai sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diukur melalui indikator pertumbuhan PDRB dari tahun ke tahun (Priadana et al., 2020). Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan membandingkan PDRB pada satu tahun tertentu (PDRBt) dengan tahun sebelumnya (PDRBt-1).

$$\text{Laju pertumbuhan ekonomi } \Delta Y = \frac{\text{PDRBt}-\text{PDRBt-1}}{\text{PDRBt}} \times 100\%$$

Teori pertumbuhan ekonomi bisa didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan. Jadi teori pertumbuhan ekonomi tidak lain adalah suatu ceritera (yang logis) mengenai bagaimana proses pertumbuhan terjadi (Boediono, 1999).

Menurut Suryana (2000), dalam bukunya mengemukakan pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Dari definisi ini mengandung tiga unsur yaitu :

1. Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses berarti perubahan yang terus-menerus yang didalamnya telah mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri untuk investasi baru.
2. Usaha meningkatkan pendapatan perkapita.
3. Kenaikan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang.

Istilah pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Sebagian ahli ekonomi mengartikan istilah ini sebagai berikut: *economic development is growth plus change* yaitu pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Dengan perkataan lain, dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi, ahli ekonomi tidak hanya tertarik kepada masalah perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi (Sukirno, 1994).

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar

Teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar dikembangkan oleh dua orang ahli ekonomi sesudah Keynes, yaitu Evsey Domar dan R.F. Harrod. Domar mengemukakan teori tersebut untuk pertama kalinya pada tahun 1947 dalam *American Economic Journal*. Sedangkan Harrod telah mengemukakannya pada tahun 1939 dalam *Economic Journal*. Maka, pada dasarnya teori tersebut sebenarnya dikembangkan oleh dua ahli ekonomi tersebut secara terpisah. Tetapi, karena inti dari teori tersebut sama, maka lebih dikenal dengan teori Harrod-Domar (Sukirno, 2006).

Teori Harrod-Domar merupakan teori perluasan dari analisis Keynes mengenai kegiatan ekonomi nasional dan masalah penggunaan tenaga kerja. Analisis Keynes dianggap kurang lengkap, karena tidak menyinggung persoalan mengatasi masalah-masalah ekonomi dalam jangka panjang. Analisis yang dibuat oleh Harrod-Domar bertujuan untuk menutupi kelemahan ini. Dengan perkataan lain, teori Harrod-Domar pada hakikatnya berusaha untuk menunjukkan syarat yang diperlukan agar pertumbuhan yang mantap atau *steady growth* yang dapat didefinisikan sebagai pertumbuhan yang akan selalu menciptakan penggunaan sepenuhnya barang-barang modal akan selalu berlaku dalam perekonomian (Sukirno, 2006).

Dalam teori Harrod-Domar pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Teori tersebut menunjukkan suatu kenyataan yang diabaikan dalam analisis Keynes, yaitu apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kesanggupan yang lebih besar untuk menghasilkan barang-barang.

Di samping itu, sesuai dengan pendapat Keynes, teori Harrod-Domar menganggap pula bahwa penambahan dalam kesanggupan memproduksi ini tidak secara sendirinya akan menciptakan penambahan produksi dan kenaikan pendapatan nasional. Harrod dan Domar sependapat dengan Keynes bahwa penambahan produksi dan pendapatan nasional bukan ditentukan oleh penambahan

dalam kapasitas memproduksi, tetapi oleh kenaikan pengeluaran masyarakat. Dengan demikian, walaupun kapasitas memproduksi bertambah, pendapatan nasional baru akan bertambah-dan pertumbuhan ekonomi tercipta-apabila pengeluaran masyarakat mengalami kenaikan kalau dibandingkan dengan pada masa sebelumnya. Bertitik tolak dari pandangan ini, analisis Harrod-Domar bertujuan untuk menunjukkan syarat yang diperlukan supaya dalam jangka panjang kemampuan memproduksi yang bertambah dari masa ke masa (yang diakibatkan oleh pembentukan modal pada masa sebelumnya) akan selalu sepenuhnya digunakan (Sukirno 2006).

Dalam menganalisis mengenai masalah pertumbuhan ekonomi teori Harrod-Domar bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi agar suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau *steady growth* dalam jangka panjang. Dengan menggunakan permisalan-permisalan sebagai berikut (Sukirno, 1994):

1. Barang modal telah mencapai kapasitas penuh
2. Tabungan adalah proporsional dalam pendapatan nasional
3. Rasio modal-produksi (*capital output ratio*) tetap, dan
4. Perekonomian terdiri dari dua sektor

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik

Pada pertengahan tahun 1950-an berkembanglah teori pertumbuhan neo-klasik, yaitu suatu analisis pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada pandangan-pandangan ahli ekonomi klasik. Perintis ekonomi neo-klasik yaitu Solow yang

kemudian diikuti oleh beberapa ahli ekonomi lain. Pendapat neo-klasik tentang perkembangan ekonomi dapat diikhtisarkan sebagai berikut (Suryana, 2000):

- a. Adanya akumulasi kapital merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi.
- b. Perkembangan merupakan proses yang gradual.
- c. Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan kumulatif.
- d. Adanya pikiran yang optimis terhadap perkembangan.
- e. Aspek internasional merupakan faktor bagi perkembangan.

Pandangan teori Neo-Klasik didasarkan pada anggapan bahwa perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (*full employment*) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Konsekuensi ini adalah bahwa seluruh faktor yang tersedia, baik berupa kapital maupun tenaga kerja akan selalu terpakai atau digunakan secara penuh dalam proses produksi. Ini disebabkan karena dengan fungsi produksi Neo-Klasik tersebut, baik kapital dan tenaga kerja yang tersedia akan dikombinasikan untuk proses produksi, sehingga tidak akan ada lagi kemungkinan kelebihan atau kekurangan faktor produksi.

Ada 4 (empat) anggapan yang melandasi model Neo-Klasik (Boediono, 1999) :

- a. Tenaga kerja (atau penduduk), L , tumbuh dengan laju tertentu, misal p per tahun.
- b. Adanya fungsi produksi $Q = f(K, L)$ yang berlaku bagi setiap periode.

- c. Adanya kecenderungan menabung (*propensity to save*) oleh masyarakat yang dinyatakan sebagai proporsi (s) tertentu dan output (Q). Tabungan masyarakat $S = sQ$, bila Q naik S juga naik, dan turun bila Q turun.
- d. Semua tabungan masyarakat diinvestasikan $S = I = \Delta K$. Dalam model Neo-Klasik tidak lagi dipermasalahkan mengenai keseimbangan S dan I .

Dalam Sukirno (2006) Teori pertumbuhan neo-klasik mempunyai banyak variasi, tetapi pada umumnya didasarkan pada fungsi produksi yang telah dikembangkan oleh dua penulis Amerika, yaitu Charles Cobb dan Paul Douglas, yang dikenal dengan *fungsi produksi Cobb-Douglas*. Fungsi tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_t = T_t K_t^\alpha L_t^\beta$$

Di mana:

Y_t = tingkat produksi pada tahun t

T_t = tingkat teknologi pada tahun t

K_t = jumlah stok barang-barang modal pada tahun t

L_t = jumlah tenaga kerja pada tahun t

α = pertambahan produksi yang diciptakan oleh pertambahan satu unit modal

β = pertambahan produksi yang diciptakan oleh pertambahan satu unit tenaga kerja

2.1.4 Pengertian Produksi dan Fungsi Produksi

Produksi sering diartikan sebagai penciptaan guna, yaitu kemampuan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Produksi mencakup pengertian yang luas yaitu meliputi semua aktivitas penciptaan barang dan jasa-

jasa. Dalam proses penciptaan ini pada umumnya membutuhkan banyak jenis faktor produksi yang dikombinasikan dalam jumlah dan kualitas tertentu. Istilah faktor produksi sering pula disebut “korbanan produksi”, karena faktor produksi tersebut dikorbankan untuk menghasilkan barang-barang produksi (Soekartawi, 1990).

Menurut Soekartawi (1990), Fungsi produksi didefinisikan sebagai hubungan teknis antara input dengan output, dimana hubungan ini menunjukkan output sebagai fungsi dari input.

Apabila input yang digunakan dalam proses produksi hanya terdiri atas modal (K) dan tenaga kerja (L) maka fungsi produksi yang dimaksud dapat diformulasikan menjadi (Nicholson, 1995):

$$Q = f(K, L)$$

Di mana:

Q = output

K = input modal

L = input tenaga kerja

Fungsi produksi di atas menunjukkan maksimum output yang dapat diproduksi dengan menggunakan kombinasi alternatif dari modal dan tenaga kerja (Nicholson, 1995).

2.1.4.1 Fungsi Produksi Cobb-Douglas

Menurut Soekartawi (1990), fungsi produksi Cobb-Douglas adalah suatu fungsi atau persamaan yang melibatkan variabel *dependen* dan dua atau lebih

variabel *independen*. Bentuk Umum dari fungsi Cobb-Douglas adalah sebagai berikut:

$$Y = aX_1^bX_2^c$$

Keterangan:

Y = Output

X_1, X_2 = Jenis input yang digunakan dalam proses produksi dan dipertimbangkan untuk dikaji

a = indeks efisiensi penggunaan input dalam menghasilkan output

b, c = elastisitas produksi dari input yang digunakan

Agar data yang diperoleh dapat dianalisis menggunakan fungsi produksi Cobb – Douglas, maka data tersebut harus ditransformasikan terlebih dahulu ke dalam bentuk linier dengan cara menggunakan logaritma natural (ln) yang selanjutnya dapat diolah lebih lanjut menggunakan analisis regresi linier berganda. Sehingga persamaanya menjadi :

$$\ln Y = \ln a + b \ln X_1 + c \ln X_2$$

Dengan mengubah persamaan ke dalam logaritma natural maka secara mudah akan diperoleh parameter efisiensi (a) dan elastisitas inputnya.

Menurut Soekartawi (1990), ada tiga alasan pokok mengapa fungsi produksi Cobb Douglas banyak dipakai oleh para peneliti, yaitu :

1. Penyelesaian fungsi Cobb Douglas relatif lebih mudah dibandingkan dengan fungsi lain, misalnya lebih mudah ditransfer ke dalam bentuk linear.
2. Hasil pendugaan melalui fungsi produksi Cobb Douglas akan menghasilkan koefisien regresi yang sekaligus juga menunjukkan besaran elastisitas.

3. Jumlah dari besaran elastisitas pada masing – masing variabel independen sekaligus juga menunjukkan tingkat besaran *return to scale*.

2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah output yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu regional atau provinsi dalam periode waktu tertentu biasanya satu tahun. PDRB merupakan salah satu ukuran kinerja pembangunan ekonomi pada tingkat wilayah (regional), sementara pada tingkat nasional dikenal dengan produk domestik bruto (PDB).

PDRB dibedakan atas PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas harga yang berlaku. PDRB atas dasar harga konstan adalah PDRB yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Sedangkan, PDRB atas dasar harga berlaku adalah PDRB yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.

2.1.5.1 Cara menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi yang menghitung pendapatan wilayah berdasarkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan seluruh sektor ekonomi dalam wilayah. Nilai tambah ini merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang diperoleh oleh unit produksi sebagai input antara nilai yang ditambahkan sama dengan balas

jasa faktor produksi atas keikutsertaannya dalam proses produksi. Unit-unit produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 17 lapangan usaha yaitu:

- a. Pertanian, kehutanan dan perikanan
- b. Pertambangan dan penggalian
- c. Industri pengolahan
- d. Pengadaan listrik dan gas
- e. Pengadaan air, pengolahan sampah dan limbah daur ulang
- f. Konstruksi
- g. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
- h. Transportasi dan pergudangan
- i. Penyediaan akomodasi dan makan minum
- j. Informasi dan komunikasi
- k. Jasa keuangan dan asuransi
- l. *Real estate*
- m. Jasa perusahaan
- n. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
- o. Jasa pendidikan
- p. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
- q. Jasa lainnya

2. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan yang menjelaskan tentang struktur/komposisi pendapatan masyarakat wilayah. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga

penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi). Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

- a. Kompensasi karyawan, meliputi upah, gaji, dan berbagai tambahan kontribusi perusahaan pada asuransi sosial dan dana pensiun, misalnya yang dibayar pada rumah tangga oleh perusahaan dan pemerintah.
- b. Pendapatan perusahaan tingkat perseorangan, pendapatan dalam bisnis yang tidak berbentuk perseroan.
- c. Pendapatan sewa, meliputi pendapatan yang diterima oleh pemilik properti dalam bentuk sewa.
- d. Laba perseroan terbatas, meliputi pendapatan bisnis korporasi.
- e. Bunga neto, meliputi bunga yang dibayarkan oleh bisnis.
- f. Pajak tak langsung dikurangi subsidi, pajak yang dikurangi subsidi yang dibayar oleh pemerintah di mana pemerintah tidak menerima keuntungan balik baik barang atau jasa sebagai imbalannya.
- g. Pembayaran transfer neto, meliputi pembayaran transfer neto oleh bisnis pada pihak yang lain.
- h. Surplus perusahaan pemerintah, meliputi pendapatan yang berlebih dari suatu anggaran perusahaan pemerintah.

3. Pendekatan Penggunaan/Pengeluaran

Pendekatan penggunaan/pengeluaran yang menjelaskan tentang penggunaan akhir dari pendapatan masyarakat. Penghitungan PDRB melalui pendekatan ini

dilakukan dengan bertitik tolak dari penggunaan akhir barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik dengan komponen yang terdiri dari:

- a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mencakup, semua pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa dikurangi dengan penjualan neto barang bekas dan sisa yang dilakukan rumah tangga.
- b. Pengeluaran Lembaga *Non Profit* yang Melayani Rumah Tangga, mencakup kegiatan dan pengeluaran yang dilakukan oleh lembaga nirlaba yang konsentrasi konsumennya adalah rumah tangga, seperti yayasan dan lainnya.
- c. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan dan belanja barang pemerintah daerah, tidak termasuk penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan.
- d. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto, mencakup pembuatan dan pembelian barang-barang modal baru dari dalam daerah dan barang modal bekas atau baru dari luar daerah. Metode yang dipakai adalah pendekatan arus barang.
- e. Perubahan Inventori, yakni perubahan stok dihitung dari PDRB hasil penjumlahan nilai tambah bruto sektoral dikurangi komponen permintaan akhir lainnya.
- f. Ekspor barang dinilai menurut harga *free on board (fob)*.
- g. Impor barang dinilai menurut *cost insurance freight (cif)*.

2.1.5.2 Manfaat Perhitungan Nilai PDRB

Adapun manfaat perhitungan nilai PDRB, diantaranya:

- a. Untuk mengetahui dan menelaah struktur atau susunan perekonomian. Berdasarkan perhitungan PDRB dapat diketahui apakah suatu daerah tersebut termasuk kedalam sektor industri, pertanian atau jasa dan berapakah besar masing-masing sektornya. Dengan bekal perhitungan ini maka dapat diketahui kemana arah perekonomian suatu daerah bergerak berapa laju kecepatan gerakannya, berapa besar dibutuhkan waktu untuk mencapai sasaran.
- b. Membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu Nilai PDRB di catat setiap tahunnya, maka akan memiliki catatan angka dari tahun ketahun sehingga dapat dibandingkan nilainya dari tahun ke tahun. Dengan demikian dapat diharapkan dapat diperoleh keterangan kenaikan atau penurunan.
- c. Untuk bahan umpan balik terhadap perancangan pembangunan yang telah dilaksanakan.
- d. Untuk dasar pembuatan proyeksi perkembangan perekonomian di masa yang akan datang.
- e. Untuk memantau perkembangan inflasi berdasarkan perubahan harga.
- f. Untuk membandingkan peranan masing-masing sektor wilayah.
- g. Untuk bahan perencanaan investasi di masa yang akan datang

2.1.6 Investasi

Investasi atau biasa disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Istilah investasi dapat diartikan juga sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-

barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang (Sukirno, 1994).

Investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi pemerintah merupakan investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan investasi swasta adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi yang dilakukan swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan memperoleh pendapatan serta didorong oleh adanya pertambahan pendapatan.

2.1.6.1 Peran Investasi dalam Pembentukan Output

Investasi merupakan suatu faktor penting bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (*sustainable development*) suatu negara maupun daerah, peningkatan output dan pengurangan kemiskinan. Hal ini dikarenakan investasi mampu memberikan sumbangan modal atau kapital dalam proses produksi yang selanjutnya akan meningkatkan kapasitas produksi nasional. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambahkan kapasitas memproduksi di masa

depan dan perkembangan ini akan menstimulir pertumbuhan produksi nasional dan kesempatan kerja (Sukirno, 2007)

Peranan investasi dalam perekonomian suatu negara maupun daerah sangatlah penting. Keberhasilan pertumbuhan PDRB, tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya investasi. Investasi adalah kata kunci penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena disamping akan mendorong kenaikan output secara signifikan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat.

Menurut Sadono Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni:

1. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja.
2. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi.
3. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Dalam teori Harrod-Domar pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah

permintaan efektif seluruh masyarakat. Teori tersebut menunjukkan suatu kenyataan yang diabaikan dalam analisis Keynes, yaitu apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kesanggupan yang lebih besar untuk menghasilkan barang-barang. Analisis Harrod-Domar bertujuan untuk menunjukkan syarat yang diperlukan supaya dalam jangka panjang kemampuan memproduksi yang bertambah dari masa ke masa (yang diakibatkan oleh pembentukan modal pada masa sebelumnya) akan selalu sepenuhnya digunakan (Sukirno 2006).

Berdasarkan teori Solow-Swan, rasio modal-output (*capital-output ratio=COR*) bisa berubah. Dengan kata lain, jika lebih banyak modal yang digunakan maka tenaga kerja yang dibutuhkan akan lebih sedikit. Sebaliknya jika modal yang digunakan lebih sedikit, maka lebih banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Dengan adanya fleksibilitas ini suatu perekonomian mempunyai kebebasan yang tak terbatas dalam menentukan kombinasi antara modal (K) dan tenaga kerja (L) yang akan digunakan untuk menghasilkan tingkat output tertentu.

2.1.6.2 Teori Investasi

a. Teori Investasi Harrod-Domar

Teori ini dikembangkan hampir pada waktu yang bersamaan oleh Roy F. Harrod (1984) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Model ini menjelaskan dengan asumsi agar perekonomian dapat mencapai pertumbuhan

yang mantap (*steady growth*) dalam jangka panjang. Asumsi yang dimaksud di sini adalah kondisi dimana barang modal telah mencapai kapasitas penuh, tabungan memiliki proporsional yang ideal dengan tingkat pendapatan nasional, rasio antara modal dengan produksi (*Capital Output Ratio/COR*) tetap serta perekonomian terdiri dari dua sektor ($Y = C + I$).

Harrod-Domar menyatakan bahwa investasi memegang peranan penting dalam proses pertumbuhan ekonomi, hal ini dikarenakan investasi mempunyai dua sifat yaitu menciptakan pendapatan dan memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan meningkatkan stok modal. Untuk menciptakan pertumbuhan yang mantap maka investasi harus senantiasa ditingkatkan, hal ini memerlukan pertumbuhan pendapatan nyata secara terus menerus pada tingkat yang cukup untuk menjamin penggunaan kapasitas secara penuh atas stok modal yang sedang tumbuh (Jhingan, 2000).

Menurut Sukirno (2006), Harrod-Domar dalam teorinya tetap mempertahankan pendapat dari ahli-ahli ekonomi terdahulu yang menekankan peranan pembentukan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Tetapi berbeda dengan pandangan kaum Klasik dan Keynes, yang memberikan perhatian pada satu aspek saja dari pembentukan modal, teori Harrod-Domar menekankan kedua aspek dari pembentukan modal. Menurut pendapat kaum Klasik, pembentukan modal merupakan suatu pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu masyarakat untuk meningkatkan produksi. Bagi kaum Klasik, pembentukan modal adalah pengeluaran yang akan mempertinggi jumlah barang-barang modal dalam masyarakat. Kalau kesanggupan tersebut bertambah, maka

dengan sendirinya produksi dan pendapatan nasional akan bertambah tinggi dan pembangunan ekonomi akan tercipta.

b. Teori Investasi Neo-Klasik

Menurut neo-klasik tingkat bunga dan tingkat pendapatan menentukan tingginya tingkat tabungan. Pada tingkat teknik tertentu, tingkat bunga akan menentukan tingginya tingkat investasi. Jika tingkat bunga rendah, maka investasi akan tinggi, dan demikian pula sebaliknya. Sebagai akibat adanya investasi yang bertambah maka tingkat bunga naik yang pada gilirannya akan menaikkan jumlah tabungan. Apabila permintaan terhadap investasi berkurang maka tingkat bunga turun dan harga barang-barang modal kembali turun, hasrat menabung turun. Pada tingkat perkembangan ini, akumulasi modal berakhir, dan perekonomian statis atau tidak mengalami perkembangan (Suryana, 2000).

2.1.6.3 Investasi PMDN

Dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, penanaman modal dibagi menjadi dua yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), disebutkan pengertian dari modal dalam negeri dalam pasal 1 yaitu sebagai berikut:

- 1) Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan "Modal Dalam Negeri" ialah : Bagian daripada kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh Negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
- 2) Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut dalam ayat 1 pasal ini dapat terdiri atas perorangan dan/atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kemudian dalam pasal 2 disebutkan bahwa, yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan "Penanaman Modal Dalam Negeri" ialah : Penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam pasal 1, baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Dalam prakteknya, dalam usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu, yang digolongkan sebagai investasi (atau pembentukan modal maupun penanaman modal) meliputi pengeluaran dan perbelanjaan sebagai berikut (Sukirno, 1994):

1. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan.
2. Perbelanjaan untuk membangun rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan-bangunan lainnya.

3. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional.

Jumlah dari ketiga jenis komponen investasi tersebut dinamakan investasi bruto, yaitu meliputi investasi untuk menambah kemampuan memproduksi dalam perekonomian dan mengganti barang modal yang telah didepresiasi. Apabila investasi bruto dikurangi oleh nilai depresiasi maka akan didapat investasi neto.

2.1.6.4 Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)

Menurut UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan jumlah modal untuk pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri. PMA terdiri atas :

1. Investasi portofolio (*portfolio investment*), merupakan investasi yang hanya melibatkan aset-aset finansial saja, seperti obligasi dan saham, yang didenominasikan atau ternilai dalam mata uang nasional.

2. Investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*), meliputi investasi ke dalam aset-aset secara nyata berupa pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, dan sebagainya.

2.1.6.5 Hubungan Investasi dengan PDRB

Menurut Sukirno (2015), investasi didefinisikan sebagai pengeluaran penanaman modal oleh perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Dengan kata lain, dalam teori ekonomi, investasi berarti kegiatan pembelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian. Secara umum investasi meliputi penambahan barang dan jasa dalam masyarakat seperti penambahan mesin-mesin baru, pembuatan jalan baru, lahan baru dan sebagainya. Investasi tidak hanya untuk memaksimalkan output tetapi untuk menentukan distribusi tenaga kerja, dan distribusi pendapatan, pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi.

Peningkatan investasi ini diyakini dapat memberikan andil yang besar terhadap pembangunan ekonomi suatu negara maupun daerah. Selain itu, investasi juga memiliki peran sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) maupun pendapatan daerah yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) . Investasi ini akan saling terkait terhadap PDRB, apabila investasi mengalami kenaikan, maka PDRB pun akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Semakin besar investasi pemerintah pada barang publik maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga,

kemudian hal ini dapat mengalokasikan sumber daya yang ada di daerah, sehingga akhirnya akan meningkatkan PDRB daerah.

2.1.7 Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja adalah penduduk yang berada di usia kerja, dalam keadaan bekerja atau aktif mencari kerja, serta masih mau dan mampu bekerja. Menurut UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, seorang tenaga kerja memiliki kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa, dalam usaha memenuhi kebutuhan pribadi atau pun masyarakat.

Menurut Mulyadi (2003), tenaga kerja merupakan penduduk usia kerja (15-64 tahun) atau jumlah penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang atau jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja dan mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut. Penduduk usia kerja sesuai dengan yang disarankan oleh *International Labour Organization (ILO)* adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dikelompokkan kedalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Menurut Simanjuntak (2002) Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja (*Labor Force*) dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja, golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan lainnya.

Tenaga kerja dalam pembangunan merupakan faktor yang potensial bagi pembangunan secara keseluruhan. Tenaga kerja adalah daya manusia untuk melakukan pekerjaan. Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian tenaga kerja yang dimuat dalam Undang-undang Pokok Ketenaga Kerjaan No. 14 Tahun 1969, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Sukirno (1994) angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Untuk menentukan angkatan kerja diperlukan dua informasi, yaitu : (i) jumlah penduduk yang berusia lebih dari 10 tahun, dan (ii) jumlah penduduk yang berusia lebih dari 10 tahun dan tidak ingin bekerja (contohnya adalah pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pengangguran suka rela lain). Jumlah penduduk dalam golongan (i) dinamakan penduduk usia kerja, sedangkan penduduk dari golongan (ii) dinamakan bukan angkatan kerja.

2.1.7.1 Hubungan Tenaga Kerja dengan PDRB

Penggunaan tambahan tenaga kerja pada tingkat tertentu akan menghasilkan tambahan *output* produksi yang kemudian akan menaikkan *output* nasional. Tanpa adanya peran tenaga kerja maka kegiatan produksi tidak berjalan, namun penggunaan tenaga kerja yang tidak memadai juga akan mengganggu jalannya proses produksi sehingga *output* produksi menurun, hal ini akan menurunkan

tingkat konsumsi dan berakibat menurunkan tingkat investasi, bila tingkat investasi rendah pada akhirnya akan membuat kegiatan perekonomian lesu.

Kesempatan kerja yang luas dapat memaksimalkan para pekerja dan meningkatkan *output* suatu daerah. Apabila tenaga kerja sebagian besar atau semua dapat tertampung dilapangan kerja maka hasil produksi baik barang atau jasa akan meningkat dan tentunya pendapatan yang diterima oleh masyarakat akan bertambah banyak. Pendapatan yang diterima masyarakat meningkat akan meningkatkan pendapatan nasional maupun daerah. Keadaan ini tidak akan ada pencari kerja yang menganggur, semua digunakan dalam proses produksi disebut kesempatan kerja penuh (*full employment*).

Menurut Datrini (2009), dalam penelitiannya menyatakan bahwa tenaga kerja merupakan faktor penting dalam hubungannya dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Menurutnya, laju pertumbuhan investasi akan menentukan pertumbuhan tenaga kerja, selanjutnya pertumbuhan tenaga kerja menentukan besarnya pertumbuhan *output*.

2.1.8 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah (*government expenditure*) merupakan bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno, 2000), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya yang tercernin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesebroto, 2002).

Pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari identitas keseimbangan pendapatan nasional yaitu $Y = C + I + G + (X-M)$ yang merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari persamaan diatas dapat ditelaah bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya (Dumairy, 2006).

Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan menjadi (Boediono,1998) :

- a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa;
- b. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai;
- c. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah di pasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment

mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.

Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung pada banyak faktor, faktor-faktor tersebut antara lain (Sukirno, 1994):

1. Proyeksi jumlah pajak yang diterima

Salah satu faktor penting yang menentukan besarnya pengeluaran pemerintah adalah jumlah pajak yang diramalkan. Dalam penyusunan anggaran belanja, pemerintah harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterimanya. Makin banyak jumlah pajak yang dapat dikumpulkan, makin banyak pula perbelanjaan pemerintah yang akan dilakukan.

2. Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai

Faktor yang lebih penting dalam penentuan pengeluaran pemerintah adalah tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah. Peranan pemerintah sangat penting dalam perekonomian. Beberapa tujuan penting dari kegiatan pemerintah adalah mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut sering sekali pemerintah membelanjakan uang yang jauh lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari pajak.

3. Pertimbangan politik dan keamanan

Pertimbangan-pertimbangan politik dan kestabilan negara selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran belanja pemerintah.

Kekacauan politik, perselisihan diantara berbagai golongan masyarakat dan daerah sering berlaku di berbagai negara di dunia. Keadaan seperti itu akan menyebabkan kenaikan perbelanjaan pemerintah yang sangat besar, terutama apabila operasi militer perlu dilakukan. Ancaman kestabilan dari negara luar juga dapat menimbulkan kenaikan yang besar dalam pengeluaran ketentaraan dan akan memaksa pemerintah membelanjakan uang yang jauh lebih besar dari pendapatan pajak.

2.1.8.1 Peran Pengeluaran Pemerintah dalam Pembentukan Output

Pembangunan ekonomi berkaitan pula dengan pengeluaran pemerintah dalam pembiayaan pembangunan. Semakin meningkatnya kegiatan pemerintah, maka pengeluaran pemerintah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut juga meningkat, oleh karena itu pengeluaran pemerintah memegang peranan penting dalam pembentukan output terutama dalam menyediakan barang dan jasa publik, ketersediaan akan barang dan jasa publik ini akan menentukan pengumpulan modal atau investasi masyarakat dan pihak swasta sehingga mendorong sektor produksi meningkat dan pada akhirnya mendorong tumbuhnya perekonomian.

Peranan pengeluaran pemerintah di negara berkembang sangat signifikan mengingat kemampuan sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masih sangat terbatas, sehingga peranan pemerintah masih sangat penting dalam perekonomian. Peningkatan permintaan berarti terjadi pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada suatu negara maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada suatu

daerah. Berdasarkan penelitian Nuraini (2010), menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh terhadap pembentukan *output* regional. Secara parsial dari semua variabel yang diteliti, hanya variabel pengeluaran pemerintah yang dapat menjelaskan pembentukan *output* regional.

2.1.8.2 Teori Pengeluaran Pemerintah Adolf Wagner

Adolf Wagner, dalam teorinya menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama cenderung semakin meningkat. Wagner mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke-19. Hasilnya menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian mengalami kecenderungan yang semakin meningkat. Kecenderungan ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah (*law of ever increasing state activity*) (Mangkoesebroto, 2002).

Berkaitan dengan hukum Wagner, ada beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan.

Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\frac{P_kPP_1}{PPK_1} < \frac{P_kPP_2}{PPK_2} < \dots < \frac{P_kPP_n}{PPK_n}$$

Keterangan :

PkPP	= Pengeluaran pemerintah perkapita
PPK	= Pendapatan perkapita, yaitu GDP/jumlah penduduk
1,2,...n	= Jangka waktu (tahun)

2.1.8.3 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan PDRB

Menurut Guritno (1999) dalam Irawati, Geogre dan Antonius (2018), pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Pengeluaran pemerintah merupakan komponen penting bagi pembangunan ekonomi, jika disuatu perekonomian peran sektor swasta menurun dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, maka pemerintah dapat memacu pembangunan ekonomi dengan cara meningkatkan jumlah pengeluaran pemerintah. Kenaikan pengeluaran pemerintah dapat merangsang perkembangan dari sektor-sektor lain.

Hal ini sangat bergantung pada sejauh mana produktifitas pengeluaran pemerintah tersebut dan distorsi pajak yang ditimbulkannya, yang mana dalam konteks ini pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi total *output* (PDRB).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun dan Judul	Variabel dan Metode Analisis	Hasil
1	Ahmad Jazuli Rahman (2016) “Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010-2014”	<p>Variabel bebas : Investasi, pengeluaran pemerintah, dan tenaga kerja</p> <p>Variabel terikat : PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Banten</p> <p>Metode Analisis : Model Regresi Data Panel</p>	<p>Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara serentak Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan hasil F Statistik 3,55 lebih besar dari F Tabel yaitu 2,38. Sedangkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa Investasi dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan Tenaga Kerja berpengaruh negatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).</p>
2	Novita Panelewen, Josep Bintang Kalangi dan Een N. Walewangko (2020) “Pengaruh Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto	<p>Variabel bebas : Investasi dan tenaga kerja</p> <p>Variabel terikat : PDRB di Kota Manado</p> <p>Metode Analisis : Analisa regresi</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi dan tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap PDRB di Kota Manado. Secara parsial investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB.</p>

	(PDRB) di Kota Manado”.	berganda dengan program SPSS 22.0	
3	Mikha Lola Melyani Silaen dan Astrid Maria Esther (2015) “Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Sektor Industri Di Provinsi Jawa Barat.”	<p>Variabel bebas : Investasi, dan tenaga kerja</p> <p>Variabel terikat : PDRB sektor industri di Jawa Barat</p> <p>Metode Analisis : Model Regresi Analisis Data Panel</p>	Berdasarkan analisis data panel, variabel investasi dan variabel tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sektor industri di Provinsi Jawa Barat.
4	Nur Feriyanto (2014) “ <i>Determinant of Gross Regional Domestic Product (GRDP) In Yogyakarta Special Province</i> ”	<p>Variabel bebas : Jumlah orang bekerja, Investasi, dan Jumlah wisatawan</p> <p>Variabel terikat : PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>Metode Analisis : <i>Multiple Regression and Partial Adjustment Model</i></p>	Hasilnya analisis regresi berganda menunjukkan bahwa jumlah orang bekerja berpengaruh signifikan dan negatif terhadap PDRB, sedangkan investasi dan jumlah wisatawan berpengaruh signifikan dan positif terhadap PDRB. Selanjutnya, berdasarkan model penyesuaian parsial, terjadi proses penyesuaian yang tinggi pada akumulasi PDRB.
5	Mertha Endah Ervina dan I Gede Nyoman Mindra Jaya. (2019). “ <i>Analyzing Factors Affecting GRDP in Indonesia Using</i>	<p>Variabel bebas : Jumlah penduduk, pendapatan asli daerah, Pengeluaran pemerintah,</p>	Variabel yang dirujuk adalah jumlah penduduk, pendapatan asli daerah, pengeluaran pemerintah,, penanaman modal dalam

	<i>Spatial Panel Data Model</i> ”.	penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, dan total tenaga kerja Variabel terikat : PDRB atas dasar harga konstan Metode Analisis : <i>The spatial panel data model</i>	negeri, dan penanaman modal asing yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB atas dasar harga konstan provinsi di Indonesia sedangkan total tenaga kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan.
--	------------------------------------	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran nyata dari bagaimana kebijakan pembangunan ekonomi tersebut berjalan, sedangkan tingkat PDRB merupakan suatu gambaran dalam kegiatan perekonomian pada suatu daerah yang akan membentuk angka PDB pada tingkat nasional.

Menurut Harrod-Domar, dalam teorinya mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang tangguh atau *steady growth* dalam jangka panjang yaitu perlunya investasi. Investasi disini dimaksudkan dengan investasi PMDN dan PMA, memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dengan peningkatan nilai PDRB, seperti dalam penelitian Ahmad Jazuli Rahman (2016), dimana ketika jumlah investasi bertambah maka akan mempengaruhi besaran PDRB. Hal ini dikarenakan penambahan investasi akan meningkatkan modal perekonomian yang nantinya akan meningkatkan produksi barang dan jasa di masa yang akan datang.

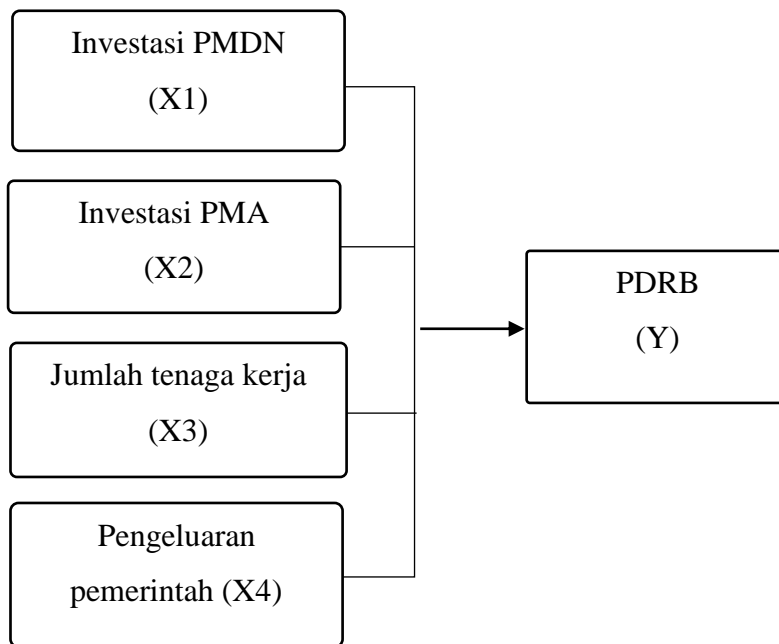
Investasi baik PMDN maupun PMA juga sebagai salah satu sarana dan motivasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya memperluas penggunaan tenaga kerja dalam meningkatkan produksi (*output*). Kaum Klasik beranggapan bahwa akumulasi *capital* sebagai suatu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi. Maka dengan adanya pembangunan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu, secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa dengan melakukan penanaman modal maka dapat meningkatkan PDRB (Boediono, 1998 dalam Dewi Maharani, 2016).

Todaro (2004), mengemukakan modal pembangunan yang penting selain investasi adalah sumber daya manusia. Suatu daerah dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan diikuti kualitas sumber daya manusia yang mumpuni atau dengan kata lain *skill* yang bagus akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi yakni disini PDRB, karena dari jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi *output* di suatu daerah. Setiap peningkatan pada jumlah penduduk dan tenaga kerja akan berpengaruh terhadap tingkat output yang akan dihasilkan. Selain itu tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan berjalan seiring dengan peningkatan pengeluaran pemerintah.

Adolf Wagner, menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Sejalan dengan penelitian Ahmad Jazuli Rahman (2016), pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh positif dan

signifikan terhadap PDRB suatu daerah, yang berarti semakin besar pengeluaran pemerintah maka pertumbuhan PDRB semakin meningkat.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, yakni uraian dari beberapa ahli yang telah dikemukakan dan penelitian terdahulu, variabel investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah erat kaitannya dengan kenaikan output suatu daerah. Karena merupakan indikator penting dari kemajuan perekonomian suatu daerah yaitu melalui pencapaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pemaparan kerangka pemikiran diatas dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan yang bersifat sementara terhadap masalah yang diajukan dan jawaban tersebut masih diuji kebenarannya secara empiris. Dalam penelitian ini akan akan dirumuskan hipotesis guna untuk mengetahui pengaruh variabel investasi PMDN dan PMA, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah sangat berhubungan dengan PDRB. Hal ini didasarkan pada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu :

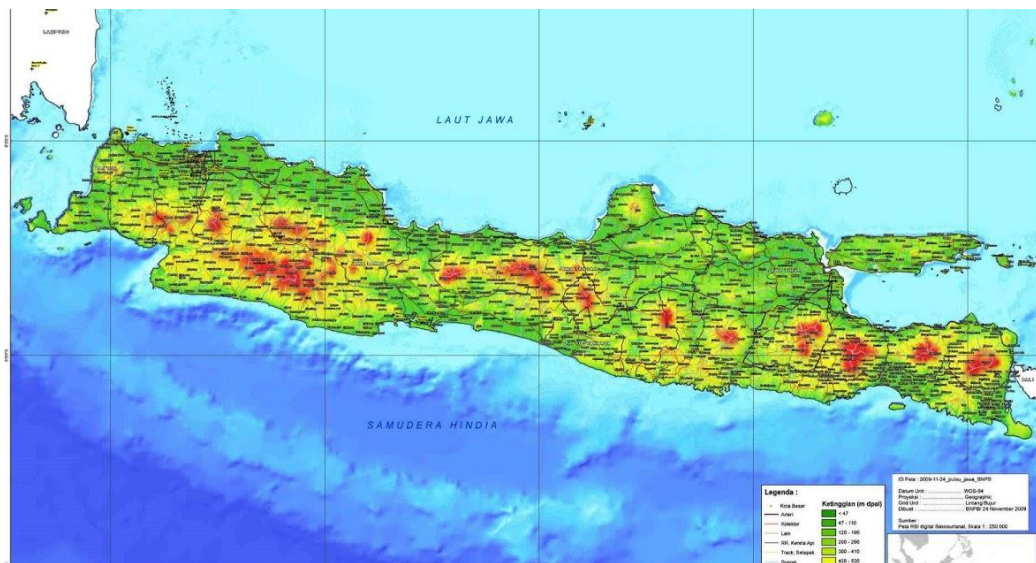
1. Diduga variabel investasi PMDN berpengaruh positif terhadap PDRB seluruh provinsi di Pulau Jawa.
2. Diduga variabel investasi PMA berpengaruh positif terhadap PDRB seluruh provinsi di Pulau Jawa.
3. Diduga variabel tenaga kerja berpengaruh positif terhadap PDRB seluruh provinsi di Pulau Jawa.
4. Diduga variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap PDRB seluruh provinsi di Pulau Jawa.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Gambaran Umum Pulau Jawa



Gambar 3.1 Peta Pulau Jawa

Pulau Jawa dikenal sebagai bagian dari wilayah Indonesia yang cukup luas. Selain itu, Pulau Jawa juga diketahui sebagai salah satu penggerak perekonomian di Indonesia. Pulau Jawa sendiri merupakan sebuah pulau di Indonesia yang merupakan pulau terluas ke-13 di dunia. Dengan jumlah penduduk lebih dari 150 juta jiwa, pulau ini merupakan pulau dengan penduduk terbanyak di dunia dan merupakan salah satu tempat terpadat di dunia.

Letak astronomis Pulau Jawa sendiri terletak di antara $113^{\circ}48'10''$ - $113^{\circ}48'26''$ BT dan $7^{\circ}50'10''$ - $7^{\circ}56'41''$ LS. Luas Pulau Jawa berdasarkan peta diperkirakan mencapai 128,297 km² dengan enam provinsi dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Pulau ini secara administratif terbagi menjadi enam provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten, serta dua wilayah khusus, yaitu DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.

Tabel 3.1
Daftar Seluruh Provinsi di Pulau Jawa

No.	Provinsi	Ibu Kota	Luas Wilayah (km ²)
1	DKI Jakarta	Jakarta	664,01
2	Jawa Barat	Bandung	35.377,76
3	Jawa Tengah	Semarang	32.800,69
4	D.I Yogyakarta	Yogyakarta	3.133,15
5	Jawa Timur	Surabaya	47.803,49
6	Banten	Serang	9.662,92

Sumber : *Badan Pusat Statistika*

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk runtut waktu (*time series*) periode tahun 2015-2019. Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber resmi, seperti dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data sekunder yang digunakan antara lain :

1. Data PDRB atas dasar harga konstan untuk masing-masing provinsi yang berada di Pulau Jawa tahun 2015-2019.
2. Data investasi PMDN untuk masing-masing provinsi yang berada di Pulau Jawa tahun 2015-2019.

3. Data investasi PMA untuk masing-masing provinsi yang berada di Pulau Jawa tahun 2015-2019.
4. Data jumlah tenaga kerja untuk masing-masing provinsi yang berada di pulau jawa tahun 2015-2019.
5. Data pengeluaran pemerintah untuk masing-masing provinsi yang berada di Pulau Jawa tahun 2015-2019.

3.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah *output* yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu regional atau provinsi dalam periode waktu tertentu biasanya satu tahun. Data PDRB yang digunakan dalam proses pengolahan data yaitu data tahun 2015-2019, dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2

**PDRB Seluruh Provinsi di Pulau Jawa Menurut Harga Konstan Tahun 2010
Periode Tahun 2015-2019 (Dalam Milyar Rupiah)**

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019
DKI JAKARTA	1.454.563,85	1.539.916,88	1.635.359,15	1.736.291,05	1.838.500,71
JAWA BARAT	1.207.232,34	1.275.619,24	1.343.662,14	1.419.689,12	1.491.705,81
JAWA TENGAH	806.765,09	849.099,35	893.750,30	941.164,12	992.105,79
D.I.Y	83.474,45	87.685,81	92.300,24	98.024,26	104.489,71
JAWA TIMUR	1.331.376,10	1.405.563,51	1.482.299,58	1.563.769,10	1.650.143,15
BANTEN	368.377,20	387.835,09	410.137,00	434.014,59	458.022,71
PULAU JAWA	5.251.789,03	5.545.719,88	5.857.508,41	6.192.952,24	6.534.967,88

Sumber : *Badan Pusat Statistika*

Berdasarkan tabel 3.2 diatas menunjukkan perkembangan PDRB harga konstan provinsi yang ada di Pulau Jawa dari tahun 2015-2019. Terlihat dari tabel diatas bahwa PDRB harga konstan provinsi di Pulau Jawa mengalami peningkatan setiap tahunnya, yakni sebesar 5.251.789,03 (Milyar Rupiah) pada tahun 2015 menjadi 6.534.967,88 (Milyar Rupiah) pada tahun 2019. Berdasarkan tabel 3.2 terlihat bahwa provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat PDRB harga konstan tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa dari tahun 2015-2019. Sedangkan provinsi D.I Yogyakarta memiliki tingkat PDRB harga konstan terendah diantara provinsi yang ada di Pulau Jawa dari tahun 2015-2019.

3.1.3 Investasi

Investasi atau biasa disebut dengan penanaman modal merupakan salah satu komponen yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Investasi dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan investasi Penanaman Modal Asing (PMA). Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sendiri diartikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

Berikut data realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) seluruh provinsi di Pulau Jawa tahun 2015-2019, dapat dilihat pada tabel 3.3 dan tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.3
Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Seluruh Provinsi di Pulau Jawa
Periode Tahun 2015-2019 (Milyar Rupiah)

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019
DKI JAKARTA	15.512,7	12.216,9	47.262,3	49.097,4	62.094,8
JAWA BARAT	26.272,9	30.360,2	38.390,6	42.278,2	49.284,2
JAWA TENGAH	15.410,7	24.070,4	19.866,0	27.474,9	18.654,7
DI YOGYAKARTA	362,4	948,6	294,6	6.131,7	6.298,8
JAWA TIMUR	35.489,8	46.331,6	45.044,5	33.333,1	45.452,7
BANTEN	10.709,9	12.426,3	15.141,9	18.637,6	20.708,4
PULAU JAWA	103.758,4	126.354,0	165.999,9	176.952,9	202.493,6

Sumber : *Badan Pusat Statistika*

Tabel 3.3 diatas menunjukkan realisasi investasi PMDN seluruh provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2015-2019. Berdasarkan tabel 3.4 bahwa realisasi investasi PMDN di Pulau Jawa mengalami kenaikan setiap tahunnya, yakni 103.758,4 (Milyar Rupiah) pada tahun 2015 menjadi 202.493,6 (Milyar Rupiah) pada tahun 2019.

Tabel 3.4
Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri/Asing (PMA)
Seluruh Provinsi di Pulau Jawa
Periode Tahun 2015-2019 (Juta US\$)

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019
DKI JAKARTA	3.619,4	3.398,2	4.595,0	4.857,7	4.123,0
JAWA BARAT	5.738,7	5.470,9	5.142,9	5.573,5	5.881,0
JAWA TENGAH	850,4	1.030,8	2.372,5	2.372,7	2.723,2
DI YOGYAKARTA	89,1	19,6	36,5	81,3	14,6
JAWA TIMUR	2.593,4	1.941,0	1.566,7	1.333,4	866,3
BANTEN	2.542,0	2.912,1	3.047,5	2.827,3	1.868,2
PULAU JAWA	15.433,0	14.772,6	16.761,1	17.045,9	15.476,3

Sumber : *Badan Pusat Statistika*

Berdasarkan tabel 3.4 diatas, berisi tentang realisasi investasi PMA seluruh provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2015-2019. Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi PMA di Pulau Jawa memiliki tren fluktuatif, yakni sebesar 15.433,0 (Juta US\$) pada tahun 2015, lalu mengalami penurunan menjadi sebesar 14.772,6 (Juta US\$) pada tahun 2016, kemudian mengalami kenaikan lagi sebesar 15.476,3 pada tahun 2019.

3.1.4 Jumlah Tenaga Kerja

Pulau Jawa merupakan basis pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ketersediaan infrastruktur, sumberdaya manusia, serta peranan administrasi merupakan faktor penting yang mendorong pesatnya pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Permasalahan penyediaan kesempatan kerja di Pulau Jawa menjadi penting dengan kondisi penduduk yang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pertambahan penduduk membuat jumlah angkatan kerja di Pulau Jawa

meningkat. Kondisi ini akan menyebabkan permasalahan pada tidak seimbangnya permintaan dan penawaran terhadap tenaga kerja. Berikut data jumlah penduduk bekerja seluruh provinsi di Pulau Jawa dari tahun 2015-2019.

Tabel 3.5
Jumlah Penduduk Bekerja Seluruh Provinsi di Pulau Jawa
Periode Tahun 2015-2019 (Jiwa/Orang)

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019
DKI JAKARTA	4.724.029	4.861.832	4.509.171	4.726.779	4.836.977
JAWA BARAT	18.791.482	19.202.038	20.551.575	20.779.888	21.902.958
JAWA TENGAH	16.435.142	16.511.136	17.186.674	17.413.869	17.602.917
D.I.Y	1.891.218	2.042.400	2.053.168	2.118.392	2.134.750
JAWA TIMUR	19.367.777	19.114.563	20.099.220	20.449.949	20.655.632
BANTEN	4.825.460	5.088.497	5.077.400	5.332.496	5.562.846
PULAU JAWA	66.035.108	66.820.466	69.477.208	70.821.373	72.696.080

Sumber : *Badan Pusat Statistika*

Berdasarkan tabel 3.5 diatas, jumlah penduduk yang bekerja di provinsi yang berada di Pulau Jawa dari tahun 2015-2019, mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terlihat pada tahun 2015 jumlah penduduk bekerja sebanyak 66.035.108 (Jiwa/Orang) menjadi 72.696.080 (Jiwa/Orang) pada tahun 2019. Tabel diatas menunjukkan bahwa provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk bekerja tertinggi diantara provinsi lain yang ada di Pulau Jawa. Sedangkan provinsi D.I Yogyakarta memiliki jumlah penduduk bekerja terendah diantara provinis lain yang ada di Pulau Jawa.

3.1.5 Pengeluaran Pemerintah

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat output suatu negara maupun daerah yaitu Pengeluaran Pemerintah. Pengeluaran Pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional.

Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Dibawah ini merupakan data realisasi pengeluaran pemerintah seluruh provinsi di Pulau Jawa dari tahun 2015-2019.

Tabel 3.6
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Seluruh Provinsi di Pulau Jawa
Periode Tahun 2015-2019 (Ribu Rupiah)

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019
DKI JAKARTA	53.419.020.077	59.392.458.271	73.535.704.732	78.671.227.891	89.088.351.843
JAWA BARAT	28.561.852.475	31.344.462.321	35.512.081.597	36.482.714.855	37.132.308.945
JAWA TENGAH	18.517.590.787	20.050.497.701	24.349.750.271	26.231.235.039	26.652.340.745
D.I.Y	3.911.107.930	4.270.072.673	5.279.617.119	5.790.570.834	6.149.113.013
JAWA TIMUR	24.678.649.609	26.527.236.416	31.851.419.352	35.289.761.233	33.843.733.801
BANTEN	9.236.214.977	9.786.470.314	10.265.222.255	11.072.775.454	12.285.531.397
PULAU JAWA	138.324.435.855	151.371.197.696	180.793.795.326	193.538.285.306	205.151.379.744

Sumber : *Badan Pusat Statistika*

Tabel 3.6 diatas berisi tentang realisasi pengeluaran pemerintah seluruh provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2015-2019. Terlihat dari tabel diatas bahwa realisasi pengeluarah pemerintah di Pulau Jawa setiap tahunnya mengalami

peningkatan, yakni sebesar 138.324.435.855 (Ribu Rupiah) pada tahun 2015 menjadi 205.151.379.744 (Ribu Rupiah) pada tahun 2019. Berdasarkan data tabel 3.3 menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun yakni dari tahun 2015-2019, provinsi DKI Jakarta memiliki pengeluaran pemerintah tertinggi diantara provinsi lain di Pulau Jawa. Sedangkan provinsi D.I Yogyakarta memiliki pengeluaran pemerintah terendah diantara provinsi lain di Pulau Jawa dari tahun 2015-2019.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif pada dasarnya menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antarvariabel yang diteliti.

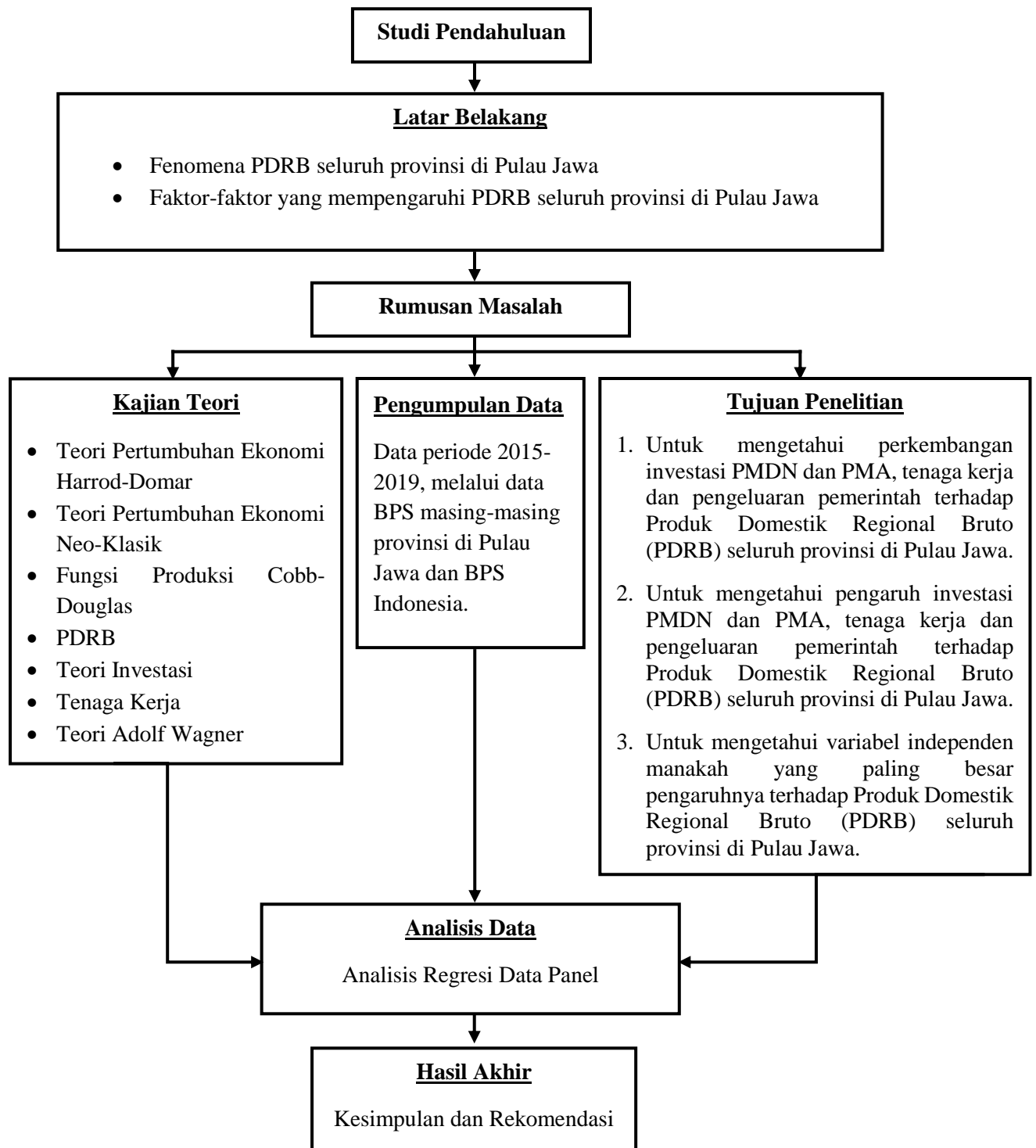
Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Jawa. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder, analisis data menggunakan data *time series* dari tahun 2015-2019 dan data cross section 6 provinsi di Pulau Jawa yaitu provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Keberhasilan dalam pengumpulan data merupakan syarat bagi keberhasilan suatu penelitian. Sedangkan keberhasilan dalam pengumpulan data tergantung pada metode yang digunakan. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan studi kepustakaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut meliputi: PDRB, investasi PMDN dan PMA, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah.

Sedangkan studi kepustakaan merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara membaca, memahami dan menganalisa sumber-sumber yang berasal dari berbagai macam buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Desain Penelitian



Gambar 3.2 Desain Penelitian

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan empat variabel penelitian, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai variabel *dependen*. Sedangkan investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah sebagai variabel *independen*. Untuk lebih jelasnya dibawah ini merupakan penjelasan mengenai definisi operasional dan kaitannya dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7 Definisi dan Operasional Variabel

No.	Jenis Variabel	Nama Variabel	Definisi Operasional Variabel	Satuan
1	<i>Dependen</i>	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi	Rupiah/Tahun
2	<i>Independen</i>	Investasi PMDN	PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.	Rupiah/Tahun
3	<i>Independen</i>	Investasi PMA	PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha	US\$/Tahun

			wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.	
4	<i>Independen</i>	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga kerja adalah penduduk yang berada di usia kerja, dalam keadaan bekerja atau aktif mencari kerja, serta masih mau dan mampu bekerja	Jiwa(Orang)
5	<i>Independen</i>	Pengeluaran Pemerintah	Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut	Rupiah/Tahun

3.6 Metode Analisis

3.6.1 Model Analisis Data Panel

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis kuantitatif dengan menggunakan data panel. Dalam teori ekonometrika,

data panel merupakan gabungan antara data *cross section* dan data *time series*. Data cross section dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari provinsi yang berada di Pulau Jawa. Sedangkan data time series dalam penelitian ini merupakan data yang diambil antara tahun 2015-2019.

Model persamaan dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = f(\text{INV PMDN}, \text{INV PMA}, \text{TK}, \text{PP})$$

Keterangan :

- Y : Produk Domestik Regional Bruto harga konstan
- INV PMDN : Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri
- INV PMA : Investasi Penanaman Modal Asing
- TK : Tenaga Kerja
- PP : Pengeluaran Pemerintah

Model regresi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{PMDN}_{it} + \beta_2 \text{PMA}_{it} + \beta_3 \text{TK}_{it} + \beta_4 \text{PP}_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

- Y : variabel PDRB atas dasar harga konstan
- PMDN : variabel investasi PMDN
- PMA : variabel investasi PMA
- TK : variabel tenaga kerja
- PP : variabel pengeluaran pemerintah

- β_0 : konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: koefisien regresi
- i : 6 provinsi di Pulau Jawa
- t : tahun 2015-2019
- e : *error*

3.6.2 Estimasi Data Panel

a. *Common Effect Model*

Model ini merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana, yaitu dengan mengkombinasi data *cross section* dan *time series*. Pada model ini tidak melihat adanya perbedaan dimensi waktu dan individu, sehingga bahwa perilaku data individu sama dalam berbagai kurun waktu.

b. *Fixed Effect Model*

Fixed Effect Model ini mengasumsikan bahwa terdapat efek yang berbeda antar individu. Perbedaan tersebut dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnnya. Untuk mengestimasi data panel model ini menggunakan teknik variabel *dummy* untuk menangkap perbedaan intersep antar individu.

c. *Random Effect Model*

Model ini digunakan untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap (*fixed effect model*) yang menggunakan variabel *dummy*, sehingga model mengalami ketidakpastian. Penggunaan variabel *dummy* akan mengurangi

derajat bebas yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi.

3.7 Penentuan Model Estimasi

3.7.1 Uji Chow

Uji chow merupakan pengujian untuk menentukan *Fixed Effect Model* atau *Common Effect Model* yang lebih tepat dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji chow adalah sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Pengujian hipotesis juga dapat dilakukan dengan membandingkan perhitungan F-statistik dengan F-tabel. Perbandingan dapat dipakai jika hasil F hitung lebih besar ($>$) dari F tabel, maka H_0 ditolak. Berarti model yang lebih tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Sedangkan jika F hitung lebih kecil ($<$) dari F tabel, maka H_0 diterima dan model yang digunakan yaitu *Common Effect Model*.

3.7.2 Uji Hausman

Uji Hausman merupakan pengujian statistik untuk memilih antara *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model* yang tepat digunakan dalam regresi data panel. Uji ini menggunakan nilai *chi square* sehingga keputusan pemilihan metode data panel ini dapat ditentukan secara statistik. Hipotesis dari Uji Hausman adalah sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Jika nilai statistik Hausman lebih besar ($>$) dari nilai kritisnya maka H_0 ditolak sehingga model yang tepat adalah *Fixed Effect Model*. Apabila sebaliknya jika nilai statistik Hausman lebih kecil ($<$) dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah *Random Effect Model*.

3.8 Pengujian Asumsi Klasik

3.8.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini pengujian normalitas yang digunakan adalah uji *Jarque-Bera (JB)*. Jika nilai probabilitas pada uji $JB > 0.05$ maka variabel tersebut terdistribusi normal. Sebaliknya, jika probabilitas uji $JB < 0,05$ maka variabel tersebut tidak terdistribusi normal (Ghazali & Ratmono, 2013).

3.8.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat masalah multikolinearitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas atau independen.

Hipotesis yang digunakan dalam uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat multikolinearitas

H_1 : Terdapat multikolinearitas

Jika koefisien antar variabel bebas lebih dari 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi mengalami masalah multikolinearitas. Sebaliknya, apabila koefisien kurang dari 0,8 maka model regresi tidak terjadi multikolinearitas (Gujarati, 2006).

3.8.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila varian dari residual dan satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastis. Sedangkan jika varian berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Adanya sifat heteroskedastisitas ini dapat membuat penaksiran dalam model bersifat tidak efisien. Uji heteroskedastisitas ini menggunakan metode *Glesjer* dengan penambahan residual absolut pada model. Hipotesis yang digunakan dalam uji heteroskedastisitas yaitu sebagai berikut:

H_0 = Tidak terdapat heteroskedastisitas

H_1 = Terdapat heteroskedastisitas

Melalui pengujian kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai *probability* kurang dari ($<$) 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.
Sebaliknya,
2. Jika nilai *probability* lebih dari ($>$) 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Gujarati, 2006).

3.9 Pengujian Statistik

3.9.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji t pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas dalam model regresi mempunyai pengaruh yang berarti terhadap variabel terikatnya. Uji ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Pada tingkat signifikan 5%, kriteria pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

H_0 = Tidak ada pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

H_1 = Terdapat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ artinya salah satu variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat secara signifikan.
2. Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ artinya salah satu variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat secara signifikan.

3.9.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas secara keseluruhan atau bersama-sama terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan derajat signifikan nilai F.

H_0 = Secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel independen.

H_1 = Secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel independen.

Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika F hitung $>$ F tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya variabel bebas (independen) secara bersama-sama mempengaruhi (positif/negatif) variabel terikat (dependen) secara signifikan.
2. Jika F hitung $<$ F tabel maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya variabel bebas (independen) secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel terikat (dependen) secara signifikan.

3.9.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi R^2 digunakan untuk mengukur seberapa jauh model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen dalam suatu penelitian. Nilai koefisien ini antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu). Jika semakin mendekati 1 (satu) besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi, maka semakin besar pula pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen (semakin besar kemampuan model yang dihasilkan dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen). Sebaliknya, jika semakin mendekati nol besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi, maka semakin kecil pula pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen (semakin kecil kemampuan model yang dihasilkan dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen). Besarnya pengaruh variabel bebas secara parsial dilihat dari besarnya determinasi parsial (R^2) (Algifari, 2000).